



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Maret 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
UNIT KERJA : PIMPINAN TERTINGGI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : Ali Mazi
2. Jabatan : GUBERNUR
3. NHK : 401285

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 18.315.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 696 m2/537 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 17.000.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 10328 m2/250 m2 di KAB / KOTA KONAWE, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
3. Tanah Seluas 715 m2 di KAB / KOTA KENDARI, HASIL SENDIRI Rp. 715.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 2.750.000.000**

1. MOBIL, Mercedes Benz S 350 CBU AT Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 650.000.000
2. MOBIL, Mercedes Benz ML 250 CDI Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000
3. MOBIL, Toyota Fortuner Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
4. MOBIL, Mercedes Benz E 320 AT Tahun 1996, HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000
5. MOBIL, LEXUS LX 470 Tahun 2002, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
6. MOBIL, Range Rover 4500 HSE Tahun 1995, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
7. MOBIL, Daihatsu Grand Max Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 2.175.000.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	4.757.230.967
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	27.997.230.967
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	27.997.230.967

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.